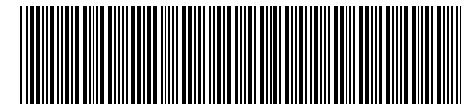




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2024**



DS:2660-3016-5580-0665

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 03

Tanggal : 30 Mei 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode>Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
- Sebesar : Rp. 148.360.000 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 148.360.000
Rp. 148.360.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	148.360.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN R E N G A T (092) Rp. 148.360.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2660-3016-5580-0665

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				148.360.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				148.360.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun				
		2. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum				
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
		5. 02	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				
		6. 03	-				
		7. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan		5.020.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	2,00	kegiatan		5.020.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	295,00	Perkara, Berkas Perkara		115.340.000
Rincian Output	:	01	BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	295,00	Perkara		115.340.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	19,00	Orang		28.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	19,00	Orang		28.000.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2024

I B. SUMBER DANA



DS:2660-3016-5580-0665

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (09) RIAU
 Kode>Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	148.360.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	148.360.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2660-3016-5580-0665

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
099217	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	-	148.360	-	-	-	148.360		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	148.360	-	-	-	148.360		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	148.360	-	-	-	148.360		
1049.AEA	Koordinasi (09.00 RIAU / RIAU)	-	5.020	-	-	-	5.020	09 . 00	
01	RM	-	5.020	-	-	-	5.020	092	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (09.05 RIAU / KAB. INDRAGIRI HILIR)	-	115.340	-	-	-	115.340	09 . 05	
01	RM	-	115.340	-	-	-	115.340	092	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (09.05 RIAU / KAB. INDRAGIRI HILIR)	-	28.000	-	-	-	28.000	09 . 05	
01	RM	-	28.000	-	-	-	28.000	092	
JUMLAH		-	148.360	-	-	-	148.360		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2660-3016-5580-0665

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099217	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	12.300	12.300	12.230	12.255	25.100	10.560	10.560	13.260	10.907	13.568	15.320	148.360
		BELANJA BARANG	0	12.300	12.300	12.230	12.255	25.100	10.560	10.560	13.260	10.907	13.568	15.320	148.360
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	0	12.300	12.300	12.230	12.255	25.100	10.560	10.560	13.260	10.907	13.568	15.320	148.360
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	12.300	12.300	12.230	12.255	25.100	10.560	10.560	13.260	10.907	13.568	15.320	148.360
		PERKIRAAN PENERIMAAN	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	885	10.455
		- PNBP (425232)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
		- PNBP (425233)	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	252	2.980
		- PNBP (425239)	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	563	6.635

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2024
IV A. B L O K I R**



DS:2660-3016-5580-0665

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [099217] PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099217/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:2660-3016-5580-0665

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [099217] PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002